



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A6
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Walikota Sampaikan Ranperda LKPJ APBD 2020 ke DPRD Padang

PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun 2020, di ruang sidang Gedung DPRD setempat, Senin (31/5).



Syafril Kani Ketua DPRD, Arnedi Yarmen Wakil Ketua DPRD, Amril Amin Wakil ketua DPRD, Ilham Maulana Wakil Ketua DPRD, Hendrizal Azhar Sekretaris DPRD

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Padang Syafril Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Selain diikuti para anggota DPRD Kota Padang, juga hadir unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan stakeholder terkait baik secara langsung maupun virtual.

Dalam kegiatan tersebut, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.

Walikota Padang menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama dalam hal ini DPRD Kota Padang. Hal itu dikarenakan, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang TA 2020 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya dengan menerimanya tujuh kali secara berturut-turut.

"Alhamdulillah, hal tersebut adalah prestasi kita di Pemko Padang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, selama ini. Ini semua juga tidak lepas

dari dukungan semua anggota DPRD Kota Padang serta seluruh unsur terkait," ungkap wako. Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang diatur dalam perwako no 12A tahun 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi Pemko Padang yang diatur dengan peraturan Walikota Padang No66 tahun 2015 dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah no 60 tentang sistem pengendalian intern pemerintah no 21 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Hendri pun mengungkapkan beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan.

Diantaranya mulai dari penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

"Selanjutnya yaitu melakukan peningkatan kota-tan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga sering meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah," bebrnyaa.

"Kita bersyukur, dari beberapa catatan-catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumbar kepada Pemko Padang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hari

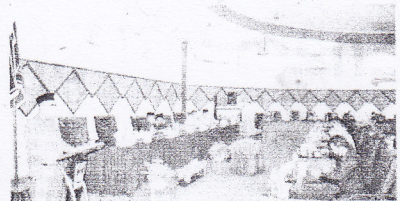
ini kita sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 kepada DPRD Kota Padang untuk dievaluasi dan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Harapan kita tentunya, semoga Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang direncanakan," tuturnya menambahkan.

Lebih jauh walikota memaparkan sekaitan realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen.

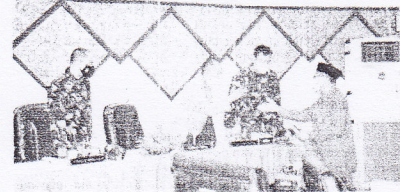
"Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebesar Rp 664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk penemuannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah," pungkash wako mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Syafril Kani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Padang yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 pada sidang paripurna tersebut.

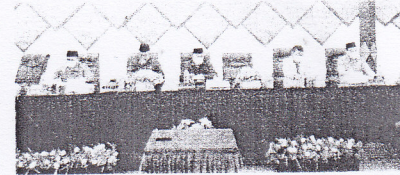
"Setelah ini kita akan menyikapinya dengan menggelar rapat paripurna internal terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sekaitan pembahasan Ranperda ini. Semoga Ranperda tersebut dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang ditentukan," tutup Syafril Kani. (*)



WALIKOTA Padang Hendri Septa menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.



WALIKOTA Padang Hendri Septa menyalami unsur Forkopimda yang hadir saat paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.



KETUA DPRD Syafril Kani membuka rapat paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 didampingi Walikota Padang, Wakil Ketua DPRD serta Sekwan.



SELURUH peserta paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD kota Padang menyanyikan lagu Indonesia Raya.



ANGGOTA DPRD Padang tampak mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.